

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**RENCANA KERJA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2020**



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gubernur Suryo NO. 05 Telp./Fax. (0334) 890388  
e-mail : [dpkp388@gmail.com](mailto:dpkp388@gmail.com)

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Pengertian Renja.....	1
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	41
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>45</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	47
3.3. Program dan Kegiatan.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan buku Rencana Kerja 2020 ini mengacu pada Perencanaan Strategis (Renstra) Periode Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sehingga Program dan Kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2020 adalah berdasarkan pada program dan kegiatan yang telah dicantumkan dalam Renstra dan RKPD tersebut.

Sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil, maka diupayakan peningkatan pelayanan publik guna kebutuhan masyarakat atas pemenuhan suatu barang dan jasa serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu, Rencana Kerja tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran tahun 2020 yang mengedepankan program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pelayanan dibidang Infrastruktur dasar diantaranya Pembangunan Rumah MBR, Pengembangan Kawasan, Perijinan Perumahan dan Siteplan, IMB, Pembangunan PSU, Pelayanan Air Minum, Pelayanan Air Limbah Domestik, Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT-PALD) sedangkan program rutin sebagai program pendukung dari program prioritas.

Demikian penyusunan Buku Rencana Kerja Perubahan ini untuk dipergunakan sebagai pedoman kerja.

Lumajang, 10 Oktober 2020

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LUMAJANG



**ENDAH MARDIANA, ST.MT**  
NIP. 19720618 199901 2 001

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; pelaksanaan fungsi administrasi serta pelaksanaan fungsi lain yang diamanahkan oleh Bupati.

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sebagai penunjang kelancaran kegiatan administrasi dan teknis pelaksanaan tugas fungsi tersebut serta terwujudnya target dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka perlu disusunnya dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman perencanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

#### **1.1.1. Pengertian Renja**

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memberikan gambaran perencanaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Dalam dokumen Rencana Kerja tahun anggaran 2020 ini dijabarkan meliputi kegiatan rutin pada Sekretariat / kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan ada pada Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Prmukiman serta Keciptakaryaan.

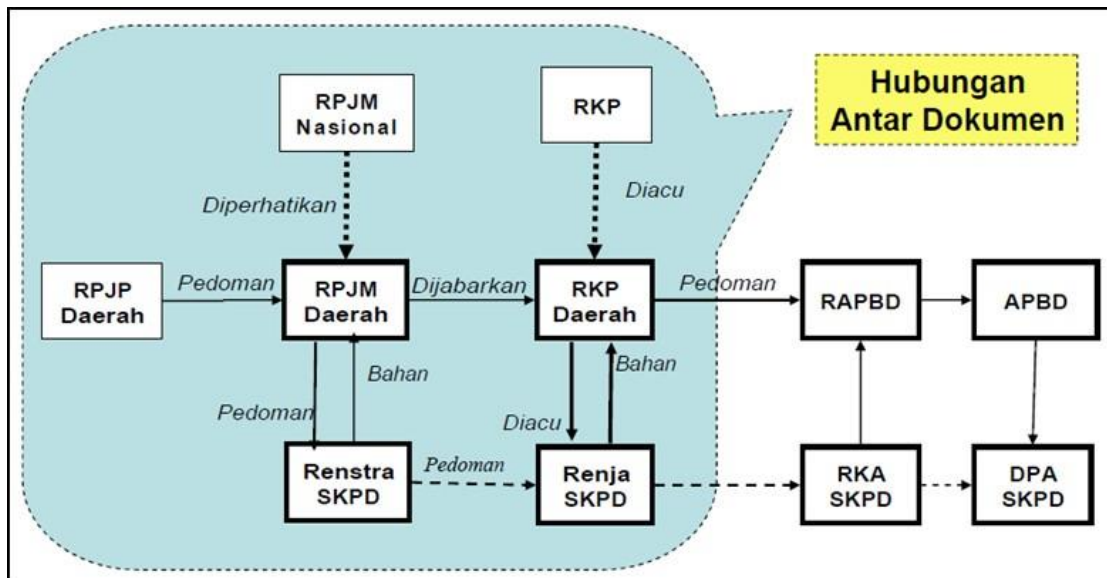
### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran berkenaan.

### **1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan**

#### **Lainnya**

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah :

Landasan Ideal : Pancasila  
 Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945  
 Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lemabaturan Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  11. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  12. Peraturan Bupati Lumajang No. 66 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang No. 62 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memberikan gambaran perencanaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Lumajang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020**

Berisi tentang :Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan capaian semester I tahun 2020;

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

**BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang : uraian penutup.

**Lampiran**



## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas**

#### **Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2020) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

Tidak ada program yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
6. Program Lingkungan Sehat Permukiman

**c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan**

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Permukiman

**d. Faktor Penyebab Keberhasilan/Tidak Berhasil**

Adanya faktor keberhasilan ketercapaian suatu program adalah penyusunan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan sesuai target dan evaluasi

**e. Implikasi dan Kebijakan yang Diambil Selanjutnya**

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

**Tabel T-C.29**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2015-2019

Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang Jawa Timur

OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = ((10/4)
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Prosentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	<b>100%</b>	<b>100%</b>						
	001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat	12	12					
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	4	4					

		0	0	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	12	12						
		0	0	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	2	2						
		0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor	73	73						
		0	1	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	12	12						
		0	1	2	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen yang tersedia	15	15						
		0	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	4	4						
		0	1	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	23	23						
		0	1	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	12	12						
		0	1	8	Rapat-rapat Koordinasi	terlaksananya rapat	12	12						

				dan Konsultasi ke Luar Daerah	koordinasi luar daerah								
		0	1	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	12	12					
0	2				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Prosentase prasarna dan sarana aparatur yang layak fungsi	<b>100</b>	<b>100</b>					
		0	0	8	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	13	13					

		0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara	20	20						
		0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yg dipelihara	17	17						
		0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yg dipelihara	11	11						
0	5				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100						
		0	0	4	Pengiriman aparatur dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur	Jml pengiriman apartur	30	30						
0	6				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	prosentase dokumen kinerja yang tersusun	100	100						

		0	0	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	jumlah laporan lakip yang tersusun	12	12						
		0	0	4	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	jumlah laporan evaluasi hasil pembangunan	4	4						
1	5				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Prosentase pengembangan perumahan</b>	<b>57,24</b>	<b>42,03</b>						
		0	1	1	Identifikasi dan fasilitasi perijinan kawasan perumahan	Jumlah perijinan kawasan perumahan dan siteplan	17	17						
		0	1	4	Fasilitasi RTLH	Jml Rehab RTLH	2000	1000						
		0	1	6	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh	Jml panjang jalan terbangun	500	500						
		0	1	7	Invetarisasi data prasarana dan sarana utilitas	Jml panjang jalan terbangun	2400	1200						
		0	1	8	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jml Rumah terbangun	600	600						
1	7				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHN</b>	Pesentase pemberdayan komunitas perumahan	100	100						
		0	0	2	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasa	Jml panjang jalan terbangun	500	500						



				<b>PERKANTORAN</b>	perkantoran									
		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah waktu pelayanan administrasi operasional perkantoran	12 bulan		12	12	100%	12	12	100%
<b>0</b>	<b>2</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Prosentase prasarna dan sarana aparatur yang layak fungsi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	26 item		26 item	26 item	100%	26 item	26 item	100%
		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	29 item		29 item	29 item	100%	20 item	20 item	100%
<b>0</b>	<b>6</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	prosentase dokumen kinerja yang tersusun	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%



		0	0	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	jumlah laporan lakip yang tersusun	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
		0	0	2	Penyusunan Laporan Keuangan Smesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan semesteran dan prognosis yang tersusun	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		0	0	3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		0	0	4	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	jumlah laporan evaluasi hasil pembangunan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		0	0	7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	jumlah dokumen RKA	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Ratio RLH	-		-	-	-	24,20	-	-
		0	1	1	Identifikasi dan Fasilitasi Perijinan Kawasan Perumahan	Jumlah ijin kawasan perumahan dan siteplan	17		27 ijin	27 ijin	100%	-	-	-

		0	1	2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Perumahan	Jumlah peta lokasi perumahan	27		40	40	100%	-	-	-
		0	1	4	Pengelolaan RUSUNAWA	Bangunan Rusunawa dan IPAL	4		2	2	100%	-	-	-
		0	1	5	Fasilitasi Pembangunan PSU	Panjang jalan yang dibangun	2400m		8000m	2231,8	27,89%	-	-	-
		0	1	6	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jml RTLH terbangun	1000 rumah		600	623	103,8 %	-	-	-
		0	1	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah	Jml Rumah MBR yang terbangun	1600 rumah		-	-	-	300 rumah	170 rumah	56,67 %
		0	1	8	Perijinan Perumahan	Jml Rekomendasi Ijin yang dikeluarkan	27 ijin		-	-	-	20 ijin	17 ijin	85 %
		0	1	9	PSU	Panjang jalan perumahan terbangun	1200 M		-	-	-	1000 M	2920,5	292%

1	6			<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>	Persentase Kawasan Kumuh	45.05 %		26,71%	26,71%	100%	-	-	-
				Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh Perkotaan	Panjang jalan terbangun	500 m2		4000m2	2231,8 m2	55,78 %	-	-	-

2	1				<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN</b>	Jml Penanganan Kawasan Kumuh tertangani	-		-	-	-	22,50	6,7	29,78 %
		0	0	1	Penyusunan Regulasi Permukiman	Jumlah drafft perbub	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
		0	0	2	Pencegahan Kawasan Kumuh	Jml Lokasi Kumuh	6 lokasi		28,5 Ha	28,5 Ha	100%	-	-	-
		0	0	3	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jml RTLH terbangun di Desa	1500 rumah		1000 rumah	865 rumah	86,5%	-	-	-
		0	1	1	Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Jml lokasi Pengembangan Kawasan	2 lokasi		2 lokasi	2 lokasi	100%	-	-	-
		0	0	8	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan yg terbangun di kawasan kumuh	-		-	-	-	2000 M	2509,5 M	129 %
		0	0	9	Penanganan Kawasan Kumuh	Panjang Drainase terbangun di Kawasan Kumuh	-		-	-	-	1000 M	3083 M	308 %
		0	1	0	Pengembangan Permukiman	Jml RTLH Terehab di Lingkungan Kumuh	-		-	-	-	1000 rumah	981 rumah	98,10 %

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang 2015-2019**

NO	INDIKATOR	TARGET				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Persentase Rumah Layak Huni	-	-	65,77	72,27	60,50%	-	-	-	
	Persentase Kawasan Kumuh	-	-	45,05	26,71	98,10%	-	-	-	
	Ketersediaan Tempat Hunian MBR	-	-	57,24	64,35	41,15%	-	-	-	

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang 2018-2023**

NO	INDIKATOR	TARGET				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	26,71%	28,5 HA	4,5 HA	5,2 HA	4,5 HA	5,3 HA	5,8 HA	6,5 HA	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

**Tabel 2.1**

**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jenis Data</b>	<b>Formulasi/Rumus Perhitungan</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Teknik Monitoring dan Evaluasi</b>
1	Luas Kawasan Kumuh Tertangani sesuai SK	Luasan (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang	Pendataan dan survey Lokasi	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan secara berkala

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi Kepala Daerah, DPKP kabupaten Lumajang berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta tingginya timbulan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

<b>POKOK MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
Kondisi Kawasan Permukiman belum memadai	Kondisi Rumah Tidak Layak Huni masih Tinggi	Jumlah Rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih belum tercukupi
		Fasum/Fasos Perumahan belum maksimal
		Pelayanan perijinan dan tata bangunan belum optimal
	Akses Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman belum merata	Belum maksimalnya Layanan Air Bersih, Limbah Domestik dan Drainase Permukiman secara merata

**Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.



Tabel T-C.31

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Kabupaten Lumajang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>DPKP</b>	<b>Persentase kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.203.535.900</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>DPKP</b>	<b>Persentase kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.203.535.900</b>	
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		Jumlah administrasi operasional perkantoran	12 Bulan	1.203.535.900	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		Jumlah administrasi operasional perkantoran	12 bulan	1.203.535.900	

<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>DPKP</b>	<b>Prosentase prasarna dan sarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>1.038.358.900</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>DPKP</b>	<b>Prosentase prasarna dan sarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>1.038.358.800</b>	
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	26 item	736.958.800	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	15 item	736.958.800	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	29 item	600.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	20 item	250.000.000	
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>DPKP</b>	<b>prosentase dokumen kinerja yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>15.702.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>DPKP</b>	<b>prosentase dokumen kinerja yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>15.702.000</b>	

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP		laporan lakip yang tersusun	16 Dokumen	4.240.000	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP		laporan lakip yang tersusun	16 Dokumen	4.240.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		jumlah laporan semesteran dan prognosis yang tersusun	5 Dokumen	970.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		jumlah laporan semesteran dan prognosis yang tersusun	5 Dokumen	970.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Dokumen	1.681.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Dokumen	1.681.000	
	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan		jumlah laporan evaluasi hasil pembangunan	4 Dokumen	1.675.000	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan		jumlah laporan evaluasi hasil pembangunan	4 Dokumen	1.675.000	

	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang disusun	12 Dokumen	7.136.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang disusun	4 Dokumen	7.136.000	
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>DPKP</b>	<b>Ratio RLH</b>	<b>24,40 %</b>	<b>3.200.942.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>DPKP</b>	<b>Ratio RLH</b>	<b>24,40 %</b>	<b>3.200.942.000</b>	
	Fasilitasi Penyediaan Rumah		Jml Rumah Layak Huni terbangun	2450 rumah	894.535.000	Fasilitasi Penyediaan Rumah		Jml Rumah Layak Huni terbangun	1000 rumah	894.535.000	
	Pengembangan Kawasan Permukiman		Permukiman yang tetangani (Ha)	10 Ha	1.259.772.200	Pengembangan Kawasan Permukiman		Permukiman yang tetangani (Ha)	10 Ha	1.259.772.200	
	Perijinan Perumahan dan Tata Bangunan		Jml Rekomendasi Ijin Perumahan	17 ijin	1.046.634.800			Jml Rekomendasi Ijin Perumahan	21 ijin	1.046.634.800	
			Jml Rumah yang ber IMB	1000 rumah				Jml Rumah yang ber IMB	1000 rumah		
			Fasum/Fasos Terbangun	2 lokasi				Fasum/Fasos Terbangun	2 lokasi		

5	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN</b>	<b>DPKP</b>	<b>Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur air minum</b>	<b>76,53 %</b>	<b>8.543.003.600</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN</b>	<b>DPKP</b>	<b>Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur air minum</b>	<b>76,53 %</b>	<b>8.543.003.600</b>	
			<b>Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur Sanitasi/Air Limbah</b>	<b>70,29 %</b>				<b>Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur Sanitasi/Air Limbah</b>	<b>70,29 %</b>		
	Peningkatan Pelayanan Air minum		Jumlah Jiwa terlayani infrastruktur	17040 jiwa	7.355.865.000	Peningkatan Pelayanan Air minum		Jumlah Jiwa terlayani infrastruktur	17040 jiwa	6.024.705.558.21	
	Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik		Jml Sarana Sanitasi Individual terbangun	500 Lokasi	703.807.200	Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik		Jml Sarana Sanitasi Individual terbangun	500 Lokasi	696.889.541	
	Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase terbangun	3076 M	225.931.400	Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase terbangun	3076 M	221.322.400	
	Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT-PALD)		Jml Cakupan Jiwa terlayani UPT-PALD	800 jiwa	257.400.000	Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT-PALD)		Jml Cakupan Jiwa terlayani UPT-PALD	800 jiwa	246.107.773	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Jalan, Drainase, Sanitasi</b>	<b>40 %</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>		<b>Persentase Jalan, Drainase, Sanitasi</b>	<b>40 %</b>	<b>2.000.000.000</b>	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

**Tabel T-C.32**

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN  
TAHUN 2020  
KABUPATEN LUMAJANG**

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Visi**

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);.
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG  
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

#### **B. Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan

akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar ( pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih ( <i>good and clean governance</i> );	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( <i>good and clean governance</i> ) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :



**Tujuan Misi 1 adalah :**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan Misi 2 adalah :**

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

**Tujuan Misi 3 adalah :**

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.1.1 Tujuan**

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur Dasar bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

#### **3.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 66

Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman dengan Indikator Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK

### 3.1.3 Strategi dan kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan. Berikut Tabel Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Lumajang :

Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kelayakan Kawasan Perumahan dan Permukiman	1	Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	2	Meningkatkan Prasarana Sarana Utilitas (Fasum/Fasos) perumahan dan Perizinan (IMB, Siteplan)
	3	Meningkatkan Pengembangan Kawasan Permukiman
Meningkatkan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	1	Meningkatkan dan memperluas Akses Jaringan Air bersih di pedesaan
	2	Meningkatkan Pengelolaan Air Limbah Domestik
	3	Meningkatkan Infrastruktur Drainase Perkotaan
Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial	1	Meningkatnya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,Jembatan dan/atau Sarana Pendukung
	2	Meningkatnya Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih

#### **3.1.4 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Seiring dengan misi yang ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
- c. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
- d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

#### **3.1.5 Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman;
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.



**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULA</b>	<b>Target Kinerja 2020</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK (HA)	Luas Kawasan Kumuh yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lumajang	5,2 HA

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :
  - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya adalah :
  - a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya adalah :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realsasi Anggaran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ;
  - d. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan;
  - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
4. Program Pengembangan Perumahan, kegiatannya adalah :
  - a. Fasilitasi Penyediaan Rumah;
  - b. Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - c. Perijinan dan Tata Bangunan.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman, kegiatannya adalah:
  - a. Peningkatan Pelayanan Air Minum;
  - b. Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik;
  - c. Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan;
  - d. Pengelolaan Air Limba Domestik (UPT-PALD)

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosisal kegiatannya adalah :
  - a. Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Limbah;
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau jembatan, Pasar, Sarana Pendukung Pariwisata;

Tabel T-C.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

## Kabupaten Lumajang

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Lumajang</b>	<b>100%</b>	<b>1.203.535.900</b>	<b>DAU</b>		<b>100 %</b>	<b>990.000.000</b>
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah administrasi operasional perkantoran yang tersedia	Kab. Lumajang	12 Bulan	1.203.535.900			12 Bulan	990.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Prosentase prasarana dan sarana aparatur</b>	<b>Kab. Lumajang</b>	<b>100%</b>	<b>1.038.358.800</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>825.000.000</b>



	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Kab. Lumajang	15 item	736.958.800			15 item	550.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Kab. Lumajang	20 item	301.400.000			20 item	275.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>prosentase dokumen kinerja yang tersusun</b>	<b>Kab. Lumajang</b>	<b>100%</b>	<b>15.702.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	jumlah laporan lakip yang tersusun		16 Dokumen	4.240.000			16 dokumen	10.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan semesteran dan prognosis yang tersusun		5 Dokumen	970.000			5 dokumen	5.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun		5 Dokumen	1.681.000			5 dokumen	5.000.000

	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	jumlah laporan evaluasi hasil pembangunan		4 Dokumen	1.675.000			4 Dokumen	5.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang disusun		4 Dokumen	7.136.000			4 dokumen	15.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Ratio RLH</b>		<b>24,40 %</b>	<b>3.200.942.000</b>	<b>DAU</b>		<b>24,59 %</b>	<b>12.000.000.000</b>
	Fasilitasi Penyediaan Rumah	Jml Rumah Layak Huni terbangun	Kab.Lumajang	1000	894.535.000	DAU		1000	3.500.000.000
	Pengembangan Kawasan Permukiman	Permukiman yang tertangani		10 HA	1.259.772.200			10 HA	4.000.000.000
	Perijinan Perumahan dan tata bangunan	Jml Rekomendasi Ijin Perumahan		21				22	
		Jml Rumah yang ber-IMB		1600	1.046.634.800			1700	4.500.000.000
		Fasum/Fasos terbangun		7				8	

<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur air minum</b>	<b>DAU</b>	<b>76,53 %</b>	<b>8.543.003.600</b>	<b>DAU</b>		<b>77,53 %</b>	<b>22.179.164.101</b>
		<b>Persentase Penduduk yang terlayani infrastruktur sanitasi/air bersih</b>		<b>70,29 %</b>				<b>71,29 %</b>	
	Peningkatan Pelayanan Air Minum	Jml jiwa terlayani Saran Prasarana Air Minum		17040 jiwa	7.355.865.000			18440 jiwa	10.107.259.000
		Jml Jiwa terlayani sarana dan prasarana air bersih teroptimalisasi		4160 jiwa				4360 jiwa	
	Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jml Sarana Sanitasi terbangun individual		500 lokasi	703.807.200			700 lokasi	5.907.669.000
		Jml sarana sanitasi terbangun komunal		20				21	
		Jml sarana dan prasarana air limbah terpelihara		1022				1743	

	Peningkatan Infrastruktur Drainase perkotaan	Panjang saluran drainase terbangun		3076 M				3101 M	
		Panjang saluran drainase yang memiliki regulasi daerah		380 M	225.931.400			430 M	5.712.293.193
	Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT-PALD)	Jml cakupan jiwa terlayani UPT PALD		800 jiwa	257.400.000			1200 jiwa	451.942.908
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pembangunan Jalan, Drainase, Sanitasi, dan Air Limbah</b>	<b>DBHCHT</b>	<b>40 %</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>DBHCHT</b>		<b>60 %</b>	<b>3.000.000.000</b>
	Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Panjang saluran, Sanitasi dibangun		1000 M	2.000.000.000			1000 M	2.000.000.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau jembatan, Pasar, Sarana Pendukung Pariwisata	Panjang Jalan, Jembatan yang dibangun		1000 M	-			1000 M	1.000.000.000

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

#### Program Utama dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2020

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Prasarana Aparatur
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan 5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4.	Program Pengembangan Perumahan	1. Fasilitasi Penyediaan Rumah 2. Pengembangan Kawasan Permukiman 3. Perijinan Perumahan dan Tata Bangunan

5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pelayanan Air Minum</li> <li>2. Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik</li> <li>3. Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan</li> <li>4. Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT-PALD)</li> </ol>
6.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih</li> <li>2. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau jembatan, Pasar, Sarana Pendukung Pariwisata</li> </ol>

#### **4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja**

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :

### Sasaran dan Indikator Kinerja

#### Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2020

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan admin. perkantoran	Jumlah administrasi operasional perkantoran yang tersedia	12 Bulan
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	26 item
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	29 item
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tertib Administrasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan lakip yang tersusun	16 dokumen
			Jml Lap. Keuangan Semesteran yang tersusun	5 Dokumen
			Jml Lap. Akhir Tahun yang tersusun	5 Dokumen
			Jml Evaluasi Hasil Pembangunan yang tersusun	4 Dokumen
			Jml Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang tersusun	4 Dokumen

4.	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya Pengembangan Perumahan	Jml Rumah Layak Huni terbangun	1600 rumah
			Jml Rekomendasi Ijin Perumahan	17
			Jml Rumah yang ber-IMB Fasum/Fasos Terbangun	1000 rumah 2 Lokasi
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	Jumlah Jiwa Terlayani Sarana dan Prasarana Air Bersih	17040 jiwa
			Jumlah Jiwa Terlayani Sarana dan Prasarana Air Bersih yang teroptimalisasi	4160 jiwa
			Jumlah Sarana Sanitasi Terbangun Individual	500 Lokasi
			Jumlah Sarana Sanitasi Terbangun Komunal	20 Lokasi
			Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah terpelihara	1022 Lokasi
			Panjang Saluran Drainase yang terbangun	3076 M
			Panjang Saluran Drainase yang memiliki regulasi daerah	380 M
			Jumlah cakupan Jiwa terlayani UPT IPALD	800 Jiwa
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Terpenuhinya Pembinaan Lingkungan Sosial	Panjang saluran, Sanitasi dibangun	3 Unit
			Panjang Jalan, Jembatan yang dibangun	-

#### 4.3. Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar **Rp 22.216.567.700,-** dan ada Selfbloking terkait anggaran sehingga ada perubahan pagu menjadi **Rp16.001.542.300,-** berkurang sebesar **Rp 6.215.025.400,-**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2020 , telah dapat dilaksanakan.

Penyusunan Buku Rencana Kerja Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021 dan Program Kerja 2021 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Kedepannya.

Manfaat yang didapatkan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan Renstra yang telah disusun, sehingga Program Kerja yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Rencana Strategis 2018 – 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.

